

IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR PADA PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH

Mansyur Mansyur^{1*} Lukman S. Thahir² & Fatimah Saguni³

¹ *Doktor Pendidikan Agama Islam, UIN Datokarama Palu*

² *UIN Datokarama Palu*

³ *UIN Datokarama Palu*

Penulis korespondensi: Nama, Mansyur E-mail: mansyur71ibrahim@gmail.com

INFORMASI

Volume: 2

KATAKUNCI

Merdeka Belajar,
Pembelajaran, Pendidikan
Agama Islam, sekolah

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsep merdeka belajar dan implikasinya dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Makalah ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi pustaka. Berdasarkan hasil pembahasan, evaluasi terdiri dari pengukuran dan penilaian. Dalam konteks pembelajaran, evaluasi mempunyai kedudukan yang sangat penting dan strategis, karena termasuk dalam langkah-langkah pembelajaran di sekolah. Tujuannya adalah untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi sistem pembelajaran. Ruang lingkupnya meliputi evaluasi pada program pembelajaran, proses pembelajaran, dan hasil pembelajaran. Secara umum prinsip evaluasi terdiri dari kontinuitas, menyeluruh, adil, objektif, kooperatif, dan praktis. Secara khusus prinsip-prinsip tersebut terdiri dari koherensi, koherensi, pedagogi, dan akuntabilitas. Berdasarkan kajian pustaka yang telah dilakukan, kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dikenal dengan kebijakan “merdeka belajar”. Kebijakan ini mencakup 4 hal: Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) yang dikembangkan oleh masing-masing sekolah; Ujian Nasional (UN) berubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan survei karakter; kebebasan pendidik untuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP); dan fleksibilitas dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Dalah Deka Learning bertujuan untuk menciptakan mahasiswa yang inovatif, kreatif dan berbasis kebutuhan masyarakat, dunia kerja, serta penilaian yang komprehensif. Adapun dalam artikel ini, peneliti menyimpulkan bahwa: pengembangan evaluasi didasarkan pada tujuan penciptaan manusia, yaitu menjadi khalifah di muka bumi ini. Dengan demikian, pendidik Pendidikan Agama Islam harus mampu mengevaluasi perkembangan peserta didik yang meliputi aspek Kognitif (aqliyah), Afektif (qolbiyah), dan Psikomotor (amāliyah).

1. Pendahuluan

Pada Industri 4.0 yang terus bergerak menuju Society 5.0. era dimana umat Islam terombang ambing antara budaya Islam dan perkembangan kekuatan modern (sekurelisasi dan modernisasi) yang sedikit banyak mempengaruhi kehidupan, pola pikir, serta gaya hidup mayoritas Umat Islam. Hal ini membutuhkan adanya evaluasi Pendidikan Agama Islam agar kegelisahan akan nilai diri sebagai manusia yang dinobatkan oleh Al-Quran sebagai Kholifah bisa tercapai di tangan-tangan glombang modernisasi yang berkembang. Berbagai krisis yang melanda manusia modern seperti krisis ekologi, epistemologi bahkan

¹ *Mahasiswa Doktor Program Studi PAI UIN Datokarama Palu*. Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIES 5.0) ke-2 pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter.

krisis eksistensial merupakan dampak dari penolakan manusia modern terhadap terhadap nilai-nilai agama. Paradigma modern dengan pendekatan positivistic antroposentris berimplikasi pada munculnya peradaban yang hanya berdasarkan kekuatan akal saja tanpa adanya cahaya tuhan unik (Nasr, 1994).

Perubahan dunia tersebut kemudian memunculkan dampak yang positif dan negatif yang kemudian menjadi tantangan besar bagi lembaga pendidikan. Dampak dari era ini dirasakan oleh semua kalangan, di antaranya oleh dunia pendidikan. Era ini ditandai dengan vitalnya peran teknologi dan informasi dalam setiap aspek kehidupan manusia. Era industri 4.0 melahirkan konsep pendidikan 4.0. Konsep pendidikan ini muncul guna mempersiapkan pengetahuan dan keterampilan-keterampilan peserta didik untuk bersaing di era modern. Salah satu karakteristik dari konsep pendidikan 4.0 adalah posisi peserta didik sebagai subjek pendidikan (*student centered*), integrasi materi serta proses belajar mengajar (PBM) dengan tuntutan pengetahuan modern, masyarakat, dan dunia kerja (Tan, 2018).

Konsep merdeka belajar yang di canangkan oleh Nadim Makariem adalah merdeka dalam berfikir. Guru sebagai komponen utama dalam pendidikan memiliki kebebasan secara mandiri untuk menterjemahkan kurikulum sebelum diajarkan kepada para siswa, dengan guru mampu memahami kurikulum yang sudah ditetapkan maka guru akan mampu menjawab kebutuhan dari para siswa selama proses pembelajaran (Hudri & Umam, 2022). Dengan ini, rancangan program pendidikan merdeka belajar diharapkan mampu mengembangkan kompetensi guru dalam pembelajaran. Pembelajaran terkesan menarik, menyenangkan, dan bermakna, sehingga dalam pencapaian tujuan pendidikan dari pihak guru sebagai pendidik dan siswa sebagai peserta didik mampu terwujud. Merdeka belajar mencakup kondisi merdeka dalam mencapai tujuan, metode, materi, dan evaluasi pembelajaran, baik bagi guru maupun siswa.

Permasalahan pendidikan yang ada saat ini direspons Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (selanjutnya penulis sebut dengan Kemendikbud) dengan mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar, Nadiem Makarim selaku Kemendikbud secara tegas menyebutkan bahwa konsep Merdeka Belajar yang digagasnya merupakan usaha untuk mewujudkan kemerdekaan dalam berpikir. Kebijakan ini dimulai dengan perbaikan standar mutu pendidik. Nadiem juga memberikan kritikan kepada lembaga pendidikan saat ini yang gagal menciptakan penilaian pembelajarannya sendiri (Persada, 2019).

Evaluasi pembelajaran merupakan kegiatan utama untuk mengetahui sejauh mana tingkat capaian kemampuan yang dimiliki siswa. Langkah tersebut diperlukan karena dapat dijadikan acuan dalam menetapkan suatu kebijakan pembelajaran selanjutnya. Evaluasi memiliki makna yang berbeda dengan penilaian dan pengukuran. Evaluasi didahului dengan penilaian (*assessment*), sedangkan penilaian didahului dengan pengukuran. Pengukuran dapat diartikan sebagai kegiatan membandingkan hasil pengamatan atau informasi karakteristik suatu objek. Oleh karena itu, penilaian menjadi proses terpenting dalam menentukan hasil evaluasi pembelajaran.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Implementasi

Terdapat berbagai pendapat para ahli dan akademisi yang mengemukakan tentang pengertian dari implementasi. Hal ini perlu dijelaskan agar pemahaman tentang implementasi dapat disinkronisasikan dari konsep penelitian terhadap suatu kebijakan atau peraturan perundangan-undangan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Karena implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan kebijakan.

Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni: 1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan. 2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana. 3. Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan. 4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak. 5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana. 6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan. Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni: 1. Penyiapan sumber daya, unit dan metode. 2. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan. 3. Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.

2.2 Merdeka Belajar

Merdeka Belajar merupakan istilah yang mulai dibahas akhir-akhir ini setelah disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim, B.A., B.A. Menurutnya ada dua poin terpenting dalam pendidikan, yaitu Merdeka Belajar dan guru penggerak. Merdeka Belajar artinya guru dan muridnya memiliki kebebasan untuk berinovasi, kebebasan untuk belajar dengan mandiri dan kreatif. Menurut Rian Iwinsyah (2020) Merdeka Belajar menjadi salah satu program inisiatif Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang ingin menciptakan suasana belajar yang bahagia dan suasana yang happy.

Tujuan merdeka belajar adalah agar para guru, peserta didik, serta orang tua bisa mendapat suasana yang bahagia. Merdeka Belajar adalah proses pendidikan yang harus menciptakan suasana-suasana yang membahagiakan. Lalu mengapa Merdeka Belajar perlu segera diterapkan? Apakah anak-anak sekarang belajar dalam kondisi tidak merdeka dan tidak bahagia? Menjawab pertanyaan ini barangkali kita bisa merefleksikan potret proses KBM yang bisa jadi membelenggu sebagian siswa di kelas, di antaranya: sebagian guru lebih banyak menggunakan metode ceramah di kelas yang pastinya membuat siswa jenuh, anak-anak masih menjadi objek dalam belajar sehingga mereka kurang kreatif karena proses KBM masih didominasi guru, anak-anak sibuk mengerjakan berbagai tugas yang diberikan guru termasuk PR, sumber belajar yang digunakan di kelas masih sangat terbatas, umumnya baru memanfaatkan buku paket saja sehingga siswa kurang diberi peluang untuk mencari bahan dari berbagai sumber selain buku paket.

2.3 Pembelajaran PAI

Menurut Isrofah (2022), pembelajaran PAI dalam Kurikulum Merdeka ditujukan untuk memberikan bimbingan kepada peserta didik, agar mantap spiritual, berakhlak mulia, selalu menjadikan kasih sayang dan sikap toleran sebagai landasan dalam hidupnya; membentuk peserta didik agar menjadi pribadi yang berakhlak mulia, akidah yang benar, syariat, dan perkembangan sejarah peradaban Islam, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari; serta membimbing peserta didik agar mampu menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam berfikir sehingga benar, tepat, dan arif dalam menyimpulkan sesuatu dan mengambil keputusan.

Selain itu, juga mengonstruksi kemampuan nalar kritis peserta didik dalam menganalisa perbedaan pendapat, sehingga berperilaku moderat dan terhindar dari radikalisme ataupun liberalisme; membimbing peserta didik agar menyayangi lingkungan alam sekitarnya dan menumbuhkan rasa tanggung jawab sebagai khalifah Allah di bumi; serta membentuk peserta didik yang menjunjung tinggi nilai persatuan, sehingga dapat menguatkan persaudaraan kemanusiaan, persaudaraan seagama, dan juga persaudaraan sebangsa serta senegara dengan segenap kebinekaan agama, suku, dan budayanya.

Adanya Kurikulum Merdeka memberikan harapan besar bagi lembaga pendidikan untuk mengeksplorasi dan mengembangkan mutu pendidikan di lembaganya. PAI sebagai rangkaian mata pelajaran Islam disampaikan baik secara formal di sekolah ataupun informal dan formal di rumah dan masyarakat. Dengan materi yang diajarkan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi harus merespons kebijakan Kurikulum Merdeka. Dengan ini, melatih peserta didik dibawa pengawasan guru PAI untuk senantiasa berpikir kritis hingga diharapkan peserta didik bisa memiliki pemikiran yang lebih matang, lebih bijak, lebih cermat, dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam itu sendiri.

2.4 Sekolah

Menurut Novi Puji Astuti, (2022), sekolah merupakan salah satu lembaga pendidikan yang dapat memberi manfaat kepada masyarakat untuk meningkatkan kemampuannya menjadi pribadi yang berkualitas. Tak hanya itu, sekolah juga bisa jadi cara meletakkan dasar relasi yang baik dengan teman-teman dan memperbanyak jaringan di pertemanan.

Pengertian sekolah menurut Abdullah (2015), berasal dari bahasa Latin, yaitu *skhhole*, *scola*, *secolae* atau *skhola* yang dapat diartikan sebagai waktu luang atau waktu senggang. Sekolah adalah kegiatan di waktu luang bagi anak-anak di tengah kegiatan mereka yang utama, yaitu bermain dan menghabiskan waktu menikmati masa anak-anak dan remaja. Kegiatan dalam waktu luang adalah mempelajari cara berhitung, membaca huruf hingga mengenal tentang moral atau budi pekerti dan estetika atau seni.

Sekolah tidak hanya memberi nilai akademis pada murid saja. Tapi fungsi sekolah lain, memberikan pelayanan dan bimbingan kepada murid dalam berbagai matra pendidikan, kognitif, afektif dan psikomotorik. Sehingga siswa tidak melulu dituntut untuk mencapai target nilai bagus di rapor atau ijazah saja.

3. Metodologi

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam artikel ini adalah pendekatan kualitatif. Sementara itu data dikumpulkan melalui metode penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur kepustakaan, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu yang difokuskan pada pengungkapan kebijakan merdeka belajar terhadap pengembangan evaluasi pembelajaran PAI (Moleong, 2002).

Sumber utama dalam studi ini adalah kebijakan kurikulum Merdeka Belajar yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sedangkan sumber sekunder didapat dari artikel jurnal nasional maupun internasional, undang-undang negara, dan sumber internet lainnya yang dapat membantu peneliti mengungkap model pengembangan evaluasi pembelajaran PAI.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Latar Belakang Merdeka Belajar

Peluncuran kebijakan merdeka belajar bukanlah tanpa suatu alasan. Merdeka belajar lahir dari evaluasi sistem dan proses pendidikan yang selama ini berlangsung. Tujuannya sederhana, agar siswa, guru bahkan orang tua terlibat aktif dalam kegiatan belajar yang menyenangkan; menjadi bagian dari proses pendidikan yang membahagiakan. Karena hakikatnya, pendidikan bukanlah beban. Beban siswa yang dijejali beragam mata pelajaran dan nilai-nilai tertinggi dapat membunuh kerativitas mereka. Beban guru yang lebih banyak terlibat urusan administrasi bahkan kepangkatan yang jadi sebab ruang geraknya tidak merdeka di dalam kelas (Hudri & Umam, 2022).

Kebijakan “Merdeka Belajar” sebagai momentum untuk mengembalikan literasi pendidikan ke khittah. Khittah pendidikan seharusnya 1) mampu memerdekakan guru dalam mengajar dan 2) memberi ruang kreativitas siswa dalam belajar sehingga tercipta suasana belajar yang menyenangkan. Karena hakikatnya, literasi pendidikan selalu mempersilakan rasa ingin tahu, terjadi komunikasi dialogis, ada ruang kreativitas, dan mampu berkolaborasi untuk meraih kepercayaan diri. Literasi pendidikan itu penting dan melebihi proses pendidikan itu sendiri. Siapapun yang terlibat dalam proses pendidikan; siswa, guru maupun orang tua harus sadar dan paham bahwa pendidikan pada akhirnya berujung pada kemampuan dan keterampilan siswa sebagai individu. Bukan karena pengaruh “kekuasaan” belajar yang dipegang guru di sekolah atau orang tua di rumah. Itulah basis literasi pendidikan, untuk menimbulkan kesadaran belajar yang mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, literasi pendidikan sangat menghendaki orientasi kebijakan pendidikan di Indonesia yang tidak lagi bertumpu pada penyeragaman administrasi; seperti kurikulum, aturan-aturan guru, dan kewajiban-kewajiban siswa (Darmayani, 2020).

Konsep merdeka belajar hampir serupa dengan trilogi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. “*Ing Ngarso Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karso, dan Tut Wuri Handayani*”. Trilogi pendidikan tersebut menekankan pada keterbukaan dalam pembelajaran yang mendorong siswa untuk melakukan eksplorasi guna menemukan jawaban atas sebuah permasalahan (Lamen, 2021). Secara lebih detail Salman Hudri dan Khotibul Umam (2022). mengelompokkan konsep merdeka belajar menjadi 4 garis besar, yaitu:

1). Asesmen Kompetensi Minimum (AKM)

AKM bertujuan agar peserta didik paling tidak memiliki kemampuan “literasi” dan “numerik”. Kemampuan literasi yang dimaksud bukan sekedar kemampuan membaca, namun kemampuan dalam mengkaji dan memahami inti dari sebuah bacaan. Sedangkan dalam kemampuan numerasi, yang dilihat adalah kemampuan peserta didik mengimplementasikan konsep numerik dalam kehidupan sehari-hari.

2). Survei Karakter

Survei Karakter (SK) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengetahui keadaan para pelajar dan infrastruktur pendidikan yang tersedia, apakah nilai-nilai Pancasila benar-benar tertanam dalam diri siswa.

3). Perluasan Penilaian Hasil Belajar

Sebelum adanya merdeka belajar guru menggunakan Ujian Nasional (UN) sebagai penilaian hasil belajar siswa. Setelah adanya program ini guru dapat melakukan penilaian melalui penugasan dan portofolio. Hal ini dinilai mampu memberikan ruang lebih kepada peserta didik untuk mengasah kemampuan yang dimiliki sesuai minat dan bakat.

4). Pemerataan Kualitas Pendidikan

Kebijakan merdeka belajar ini diharapkan dapat dilakukan secara menyeluruh sebagai wujud pemerataan kualitas pendidikan hingga ke daerah 3T. Konsep merdeka belajar dalam pemerataan kualitas pendidikan ini dinilai sebagai langkah yang baik dalam rangka mempersiapkan bonus demografi Indonesia pada tahun 2030 mendatang.

4.2. Era Merdeka Belajar

Menurut KBBI Edisi V, era memiliki arti kurun waktu dalam sejarah; sejumlah tahun dalam jangka waktu antara beberapa peristiwa penting dalam sejarah; masa. Sementara itu, anjakan program pendidikan "merdeka belajar" oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim menegaskan bahwa guru dan siswa memiliki kebebasan dalam berinovasi, mampu belajar dengan mandiri, dan kreatif (Kemendikbud, 2019). Pada dunia pendidikan, merdeka belajar mencakup kondisi merdeka dalam mencapai tujuan, metode, materi, dan evaluasi pembelajaran baik bagi guru maupun siswa (Hudri & Umam, 2022). Era merdeka belajar dapat diartikan sebagai masa di mana guru dan siswa memiliki kemerdekaan atau kebebasan berfikir, bebas pendidikan kini masih ada permasalahan terlebih dalam ketidakberhasilan guru melakukan evaluasi pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan di era merdeka belajar.

Kebijakan Merdeka Belajar merupakan usaha Kemendikbud untuk mengembangkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing lulusan lembaga pendidikan pada skala nasional maupun global. Diawal pengenalan kebijakan ini, berbagai kalangan meragukan penerapan Merdeka Belajar. Muncul beberapa pertanyaan mendasar, menurut Arifin & Muslimin, (2020), diantaranya adalah (1) bagaimana mekanisme penerapan kebijakan ekstrim ini di lembaga pendidikan? dan (2) apakah perubahan besar pada beberapa aspek Kurikulum 2013 justru tidak merusak dan memperlambat peningkatan kualitas pendidikan? Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada Kebijakan Merdeka Belajar Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan mata pelajaran yang memiliki ciri khas yang berbeda dari pada mata pelajaran lainnya. Karakteristik mata pelajaran PAI yakni masuknya nilai ilahiah sebagai *core values* dalam PBM. Aspek ilahiah ini kemudian dijabarkan pada ranah *'aqliya* (kognitif), *qalbiya* (afektif), dan *'amaliya* (psikomotorik) (Hidayat & Asyafah, 2019). Konsep *'aqliya* memiliki nilai yang berbeda dengan aspek kognitif, begitu pula konsep *qalbiya* dan *'amaliya* berbeda dengan aspek afektif dan psikomotorik. Dalam pembelajaran PAI, ketiga ranah ini selalu terkait dengan tujuan penciptaan manusia sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi (Imelda, 2017).

Melihat karakteristik kebijakan Merdeka Belajar yang bercirikan pada kreatifitas pendidik, kontekstualisasi materi dengan kompetensi yang dibutuhkan masyarakat dan lingkungan, kebebasan dalam desain pembelajaran, fleksibilitas desain penilaian, serta orientasi pada pemecahan masalah, penilaian otentik merupakan teknik penilaian yang tepat untuk terus dikembangkan dan diimplementasikan pada PBM. Adapun karakteristik dari penilaian otentik adalah (1) desain pembelajaran berbasis pada pengalaman nyata; (2) penilaian dilakukan pada keseluruhan tahapan pembelajaran; (3) penilaian diukur secara menyeluruh pada keseluruhan kompetensi peserta didik; (4) penilaian dilakukan untuk menilai kebermaknaan pemahaman peserta didik bukan hanya pada hafalan (kuantitas) (Siregar, 2018).

4.3. Evaluasi Pembelajaran

Secara etimologis, evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, artinya penilaian. Menurut Suharsimi Arikunto (2013), dari kata evaluation ini diperoleh kata Indonesia evaluasi yang berarti menilai (tetapi dilakukan pengukuran terlebih dahulu). Pada kegiatan evaluasi terdapat dua langkah yang harus dilakukan terlebih dahulu yaitu mengukur dan menilai. Mengukur adalah membandingkan sesuatu dengan satu ukuran, pengukuran bersifat kuantitatif. Adapun menilai adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruk, penilaian bersifat kualitatif. Sejalan dengan itu, definisi lain, bahwa evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas (nilai dan arti) daripada sesuatu, berdasar pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka mengambil suatu keputusan (Asrul, dkk, 2015). Pada bidang pendidikan, evaluasi memiliki beberapa pengertian. Menurut Tyler dalam Suharsimi Arikunto, (2013), evaluasi adalah sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagian mana tujuan

pendidikan sudah tercapai. Penjelasan lebih luas dikemukakan oleh Conbanch dan Stufflebea (2009), bahwa proses evaluasi bukan sebatas mengukur sejauh mana tujuan tercapai, tetapi digunakan untuk membuat keputusan dalam program pembelajaran selanjutnya. Jadi, evaluasi pembelajaran dapat diartikan sebagai proses pengumpulan data untuk menentukan kualitas pembelajaran, mengetahui sejauh mana tujuan pendidikan sudah tercapai dalam rangka mengambil suatu keputusan untuk program pembelajaran selanjutnya.

Penerapan ketiga (Aqliyah, Qolbiyah, dan Amaliyah) konsep pendidikan tersebut dapat efektif dengan adanya evaluasi terhadap program-program pendidikan di lembaga pendidikan. Evaluasi Pembelajaran (penilaian pembelajaran) adalah proses pengumpulan informasi, pengolahan, serta analisis data untuk melihat ketercapaian hasil belajar peserta didik (Permendikbud, 2006).

Sementara itu tujuan evaluasi pembelajaran PAI memiliki kedudukan yang vital untuk melihat ketercapaian standar kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik baik pada aspek 'aqliya, 'amaliya, maupun qalbiya. Maka dari itu evaluasi yang dikembangkan oleh pendidik harus mencakup ketiga ranah tersebut. Sedangkan Fungsi evaluasi pembelajaran PAI adalah (1) menilai ketercapaian standar kompetensi dan (2) sebagai bahan penunjang penyusunan perencanaan pembelajaran. Hasil penilaian digunakan untuk melihat hasil pembelajaran PAI yang telah dilakukan berdasarkan pada tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Evaluasi pembelajaran yang berkesinambungan dapat mempermudah pendidik maupun sekolah untuk mengembangkan model perencanaan, pelaksanaan, dan hasil belajar. Proses ini selanjutnya mampu menyempurnakan program pembelajaran PAI menjadi lebih baik (Hidayat & Syafe'i, 2018).

4.4. Pendidikan Agama Islam

Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, mengimani, bertakwa, berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya kitab suci al-Quran dan al-Hadits, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman (Ramayulis, 2005). Jadi, pembelajaran PAI adalah proses interaktif yang berlangsung antara pendidik dan peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dan meyakini, menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam.

Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran pendidik tidak saja dituntut menguasai materi pelajaran, strategi, dan metode mengajar, menggunakan media atau alat pembelajaran. Tetapi pendidik juga harus menciptakan situasi dan kondisi belajar mengajar bisa berjalan dengan baik sesuai perencanaan dan mencapai tujuan sesuai yang dikehendaki.

Dalam proses pembelajaran pendidik mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan kualitas pembelajaran yang dilaksanakan, pendidik harus selalu menciptakan suasana yang kondusif dalam lingkungan pendidikan dan menjalankan tugasnya di dalam kelas dengan maksimal sehingga tercapai pembelajaran yang efektif.

PAI dibangun oleh dua makna esensial yakni "pendidikan" dan "agama Islam". Salah satu pengertian pendidikan menurut Plato adalah mengembangkan potensi siswa, sehingga moral dan intelektual mereka berkembang sehingga menemukan kebenaran sejati, dan guru menempati posisi penting dalam memotivasi dan menciptakan lingkungannya (Fathoni, 2010). Dalam etikanya Aristoteles, pendidikan diartikan mendidik manusia untuk memiliki sikap yang pantas dalam segala perbuatan (Bunyamin, 2007).

5. Kesimpulan

Pada era merdeka belajar mencakup kondisi merdeka dalam mencapai tujuan, metode, materi, dan evaluasi pembelajaran. Kegiatan evaluasi inilah yang menjadikan guru berperan sebagai perantara untuk mewujudkan tujuan pendidikan di era merdeka belajar. Guru harus memahami tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. Selain itu, Guru diharapkan mampu mewujudkan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan, dan menarik, sehingga kegiatan evaluasi pun berfungsi sebagaimana mestinya. Realitanya, terdapat guru yang tidak memperdulikan hal tersebut. Pada pembelajaran yang terpenting guru masuk kelas, mengajar, melakukan evaluasi yang monoton, mengutamakan pada nilai akhir, melaksanakan waktu evaluasi sesuai atas kemauan dan kemudahan guru tanpa memperdulikan konsep dasar evaluasi untuk tujuan pendidikan. Anggapan guru yang terpenting pada akhir semester ia telah mencapai target kurikulum. Hal tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara evaluasi pembelajaran dengan tujuan pendidikan di era merdeka belajar.

Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, mengenai Merdeka Belajar meliputi (1) ujian sekolah berstandar nasional (USBN) dikembangkan oleh sekolah masing-masing; (2) Ujian nasional (UN) berubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter; (3) kebebasan pendidik untuk mendesain rencana pelaksanaan pembelajaran

(RPP); dan (4) fleksibilitas dalam peraturan penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Kebijakan Merdeka Belajar Nadiem Makarim ini layak untuk diapresiasi, terlebih dengan latar belakang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bukan dari kalangan dunia pendidikan mampu memberikan gebrakan kebijakan yang dirasakan berbagai kalangan mampu membawa kemajuan pendidikan Indonesia.

References

- Arifin, Syamsul dan Muslim, Moh. (2020). Tantangan Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka' pada Perguruan Tinggi Islam Swasta di Indonesia, *Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi* 3, (1) 4-17. <https://doi.org/10.32529/al-ilm.v3i1.589>.
- Arikunto, Suharsimi. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Asrul, dkk. (2015). *Evaluasi Pembelajaran*. Bandung: Cita Pustaka Media.
- Bunyamin, Maftuh. (2007). *Model Pembelajaran Pendidikan Nilai*. Bandung: CV Maulana.
- Fathoni, Abdurrahmat. (2010). *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Cronbach, Sufflebeam, Daniel and Anthony J. Shinkfield. (2009). *Evaluation Theory, Models, and Applications*. San Francisco: A Wiley Imprint.
- Darmayani. (2020). Implementasi "Merdeka Belajar" Dalam Dunia Pendidikan Kita. <http://perpus.smpn6salatiga.sch.id/wp-content/uploads/2020/10/JURNAL-DARMAYANI-dikonversi.pdf>. Diakses pada tanggal 7/6/2023.
- Hidayat, Tatang dan Asyafah, Abas. (2019). Konsep Dasar Evaluasi dan Implikasinya dalam Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah, *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*. 10, (1), 51-59.
- Imelda, Ade. (2017). Implementasi Pendidikan Nilai dalam Pendidikan Agama Islam, *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 8, (2), 228. <https://doi.org/10.24042/atjpi.v8i2.2128>.
- Lamen, Y. M., & Sunarto, S. (2021). Implementasi Trilogi Kepemimpinan Ki Hadjar Dewantara dalam Manajemen Strategik Pembelajaran. *Media Manajemen Pendidikan* 4, (1), 36-47. <https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/mmp/article/view/8168>.
- Moleong, Lexy J. (2002). Metodologi Penelitian Kualitatif. Kemendikbud dan Mohammad Tohir, —Empat Pokok Kebijakan Merdeka Belajar, *Preprint (Open Science Framework)* (15 Desember 2019). <https://doi.org/10.31219/osf.io/67rcq>. Diakses tanggal 7 Juni 2023.
- Kemendikbud. (2019). Pidato Mendikbud Nadiem Makarim pada Upacara Bendera Peringatan Hari Guru Nasional. Diakses pada tanggal 20 April 2021, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: <https://www.kemendikbud.go.id/main/blog/2019/11/pidato>. Di akses tanggal 6 Juni 2023.
- Mulyadi, Deddy. (2015). *Study Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nasr, Sayyed Hossein. (1994). *Traditional Islam in The Modern World*, Terj. Luqman Hakim Bandung: Pustaka.
- OECD. (2018). PISA 2021 mathematics framework (second draft). Paris: PISA OECD Publishing.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan.
- Salman Hudri dan Khotibul Umam. (2022). Konsep Dan Implementasi Merdeka Belajar Pada Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Moderasi : Journal of Islamic Studies*. Vol. 2 No. 1 Juni 2022, 51-59.
- Ramayulis, (2005). *Metodologi Pendidikan Agama Islam*, Jakarta, KalamMulia.
- S. Y. Tan, et al., (2018). Rethinking Our Education to Face the New Industry Era, *in Proceedings of EDULEARN 18 Conference 2nd-4th July 2018* (Palma, Mallorca, Spain): 65–66.
- Syailendra, Persada. (2019). Nadiem Makarim: Merdeka Belajar adalah Kemerdekaan Berpikir, *Tempo*, 13 Desember 2019, dalam <https://nasional.tempo.co/read/1283493/nadiem-makarimmerdeka-belajar-adalah-kemerdekaan-berpikir>. Diakses tanggal 7 Juni 2023.
- Siregar, Lailan Aprina, (2018). Penilaian Otentik dalam Kurikulum 2013, *Al-Razi* 18, no. 2 (Desember 2018): 1–11.
- Tyler, Ralph. (1950). *Models Of Teaching*. New Jersey: PrenticeHall, Inc. Englewood Cliffs.

T. Hidayat dan M. Syafe'i, (2018). Filsafat Perencanaan dan Implikasinya dalam Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah,| *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan* 21, (2), 188–205. <https://doi.org/10.24252/lp.2018v21n2i5>.

Astuti, Novi Puji. (2022). Pengertian dan Fungsi Sekolah Menurut Ahli. <https://www.merdeka.com/jabar/pengertian-sekolah-menurut-para-ahli-berikut-fungsinya-klm.html>. Diakses tanggal 8 Juni 2023.